

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teoritis

2.1.1 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam suatu jenjang pendidikan, baik dijenjang sekolah dasar (SD), SMP, SMA dan perguruan tinggi, karena dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perkembangan moral dan budi pekerti siswa sebagai warga negara yang baik sangat ditekankan dan dibentuk.

Pada hakikatnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk menyiapkan para siswa kelak sebagai warga masyarakat sekaligus warga negara yang baik. Sehubungan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam jenjang pendidikan dasar dan negara secara konseptual mengandung komitmen utama dalam pencapaian dimensi tujuan pengembangan kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Berdasarkan orientasi pada komitmen tersebut, maka peran dan fungsi serta tanggung jawab guru Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan diharapkan mampu menjadikan para siswa sebagai para calon warga negara yang baik. Adapun ciri-cirinya antara lain religius, jujur, disiplin, tanggung

jawab, toleran, sadar akan hak dan kewajiban, mencintai kebenaran dan keadilan, peka terhadap lingkungan, mandiri dan percaya diri, sederhana, terbuka penuh pengertian terhadap kritik dan saran, patuh dan taat terhadap peraturan, serta kreatif dan inovatif.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

2.1.1.1 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Menurut M. Daryono (1998: 29)“ Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berusaha membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian bangsa, yang melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila, tanpa Pendidikan Kewarganegaraan, segala kepintaran atau akal, ketinggian ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecekatan, tidak memberikan jaminan pada terwujudnya masyarakat Pancasila”.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, dalam kehidupan yang demokratis. Dalam demokrasi konstitusional, *civic education* yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita

mendengar dan mengakomodasi pihak lain. Partisipasi warga negara dalam masyarakat demokratis, tentunya didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab warga negara.

Menurut kurikulum 2004 Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan standar isi BSNP (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 2) Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

- 1) Berpikir secara kritis rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis berkembang diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dan dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Didalam modul Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan (Standar Isi 2006:7) secara eksplisit tercantum tujuan kurikuler PKn adalah kelima Pancasila, yaitu sebagai berikut.

- 1) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

- 2) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila persatuan Indonesia.
- 4) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan tujuan kurikuler tersebut, yang sangat jelas menggunakan istilah: memahami, menghayati, dan mengamalkan, maka tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut.

- a. Aspek kognitif (pengetahuan, memahami), kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berfikir/nalar.
- b. Aspek afektif (nilai, menghayati), kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya.
- c. Aspek psikomotor (perilaku, mengamalkan), kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot (*neuronmuscular system*) dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri pada.
 - (a). Kesiapan (*set*), (b) Peniruan (*imitation*), (c) Membiasakan (*habitual*),
 - (d) Menyesuaikan (*adaptation*) dan (e) Menciptakan (*origination*).

Menurut Ace Suryadi, Dasmin Budimansyah (2009: 15) bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah mendidik peserta didik untuk dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia, terdidik dan bertanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan yang dimanifestasikan di dalam kurikulum sekolah ialah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

2.1.2 Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses belajar yang dialami siswa. Pengalaman belajar siswa juga bisa didapatkan dari berbagai informasi seperti tulisan-tulisan, didapatkan dari gambar-gambar yang berkaitan dengan materi belajar, dan juga bisa didapatkan dari siaran televisi atau gambaran atas gabungan beberapa objek secara fisik dimana guru akan memberikan arahan atau aturan untuk memandu siswa tersebut.

Disimpulkan bahwa pembelajaran itu merupakan proses interaksi belajar mengajar antara kedua belah pihak, yaitu antara siswa dan guru guna terjadinya perubahan, pembentukan, dan diharapkan nantinya memiliki pola perilaku yang

lebih baik ke depan. Pembelajaran juga merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang merupakan keberhasilan guru dan siswa.

2.1.2.2 Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Semua pendidikan yang dirancang tentulah mempunyai tujuan nasional, tujuan pendidikan khusus (misalnya pendidikan tinggi), tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Tujuan-tujuan itu semua dibuat berdasarkan suatu rumusan yang jelas dan terukur bermuara pada perubahan-perubahan segi sistem berfikir, pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didik seperti apa yang hendak dicapai setelah mereka berhasil dengan baik menyelesaikan pendidikannya.

Upaya utama yang dapat mencapai perubahan-perubahan segi sistem berfikir, pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didik antara lain ialah melalui proses belajar-mengajar (pembelajaran) dan kegiatan akademik lainnya baik yang direncanakan maupun spontan.

Mengusahakan terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif yang menunjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang tenang dalam lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Namun pengaruh guru pada perubahan-perubahan segi sistem berfikir, pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didik amatlah besar karena berlangsung atau tidaknya proses pembelajaran (belajar-mengajar) secara benar, bergantung pada pribadi dan tingkat kecerdasan guru, sedangkan unsur lainnya berfungsi sebagai penunjang belaka.

Proses pembelajaran (belajar-mengajar) Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses menyampaikan, menanamkan, mengembangkan, dan mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 kepada anak didik agar menjadi manusia dan warga negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis.

Berdasarkan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan yang dituangkan dalam Standar Proses Pendidikan Kewarganegaraan (2006: 95), Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memuat uraian tentang.

1. Tujuan (*instructional objectives*) mata pelajaran yang dirumuskan berupa ramuan dari sumber bahan yang diangkat dari rasional program.
2. Pengalaman belajar (*learning experiences*) yang direncanakan baik menyangkut bidang teori, praktikum maupun pengalaman di lapangan.
3. Topik dan Sub topik yang akan disajikan, yang dianggap penting dan esensial sebagai bahan ajar (*instructional materials*) yang akan dijadikan pembekalan yang cocok untuk pelaksanaan spektrum tugas mendukung kompetensi yang diharapkan.
4. Cara dan Teknik penyajian (*course offering style*) yang dipilihkan dan serasi dengan sifat dan ciri bahan ajar.
5. Takaran waktu yang dianggap memadai untuk penyajian bahan ajar baik yang bersifat klasikal, laboratorer maupun kerja lapangan (*field work*).
6. Bahan sumber yang cocok sebagai buku dasar (*text book*), maupun referensi guna pengayaan (*enrichment*) melengkapi bahan ajar.

Hakikat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu upaya untuk mengartikan, menyalurkan, dan membina peran warga negara dari berbagai

aspek kehidupan agar terbentuk sebagai warga negara yang baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. serta memiliki tujuan dan program yang sejalan dengan upaya pembentukan manusia dan warga negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis. Maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat besar dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat mentransformasikan, menanamkan, mengembangkan, serta mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

2.1.2.3 Tinjauan tentang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Lazimnya suatu bidang studi yang diajarkan disekolah, materi keilmuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan nilai (*value*) berupa watak kewarganegaraan. Sejalan dengan ide pokok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga dengan negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan bidang kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan Kewarganegaraan dijabarkan dari antara lain. Disiplin ilmu, hukum, sejarah, ekonomi, moral dan filsafat. Dengan memperhatikan visi dan misi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik, maka selain mencakup dimensi pengetahuan, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ditandai dengan pemberian penekanan pada dimensi sikap dan keterampilan menentukan posisi diri, keterampilan hidup dan sebagainya.

Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan serta nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi seorang warga negara yang memiliki rasa percaya diri, kemudian warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi seorang warga negara yang berpengetahuan dan berkepribadian.

Adapun substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan terdiri pada.

a. Pengetahuan kewarganegaraan.

Mencakup bidang politik, hukum dan moral secara lebih terperinci materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik.

b. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*).

Meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya. Berperan secara aktif mewujudkan masyarakat madani, keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama dan mengola konflik, keterampilan hidup dan sebagainya.

c. Keterampilan kewarganegaraan (*civic values*).

Mencakup percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan demokratis, toleransi, kebebasan berserikat dan berkumpul, perlindungan terhadap minoritas dan sebagainya.

Adapun tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kemampuan sebagai berikut.

1. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2.1.2.4 Pengertian Umum Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pedoman itu memuat tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Salah satu tujuan pada penggunaan model pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa selama belajar. Model pembelajaran itu pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode dan teknik pembelajaran.

2.1.2.5 Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan IPS

Memahami *social studies*, kita harus mengembalikannya pada perkembangan pemikiran yang praktis tentang itu, yaitu merujuk kenegaraan Amerika Serikat yang memiliki reputasi akademis dalam bidang *social studies* tersebut.

Definisi *social studies* sebagai pilar historis epistemologis yang pertama kali dikemukakan oleh Weasley (1937) dalam Pargito (2010: 22) menyatakan bahwa *social studies are the social science simplified pedagogical purposes*. Maksudnya bahwa studi sosial adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Pengertian tersebut kemudian dibakukan dalam buku *the united state of education's standard terminology for curriculum and instruction* sebagai berikut *the social studies comprised of those aspect of history, economic, political science, sociology, anthropology, psychology, geography, and philosophy wich in practice are selected for purposes inschools and colleges,*

maksudnya bahwa *social studies* berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi dan filsafat yang dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah hingga keperguruan tinggi.

Jika dianalisis dari pengertian awal *social studies* mengisyaratkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, *social studies* adalah disiplin ilmu-ilmu sosial. Kedua, disiplin ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan atau pembelajaran, baik ditingkat sekolah hingga kependidikan tinggi. Ketiga, oleh karenanya aspek-aspek haruslah diseleksi sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran tersebut.

Pendidikan sosial terus berkembang secara pesat, hingga pada antara tahun 1976 – 1983, pendidikan sosial memiliki definisi yang beragam dan rasional. Terlepas dari banyaknya definisi yang dikemukakan para ahli tentang pendidikan sosial ditegaskan bahwa jantung dari pendidikan sosial adalah hubungan atau interaksi antar manusia, sedangkan jika dilihat dari visi misi dan strateginya pendidikan sosial dikembangkan dalam tiga tradisi, Pargito (2010) yaitu. (1) studi sosial diajarkan sebagai pendidikan kewarganegaraan (*citizenship transmission*). (2) studi sosial diajarkan sebagai ilmu sosial. (3) studi sosial yang diajarkan sebagai *reflective inquiry*.

Pengertian studi sosial adalah integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk kepentingan pembelajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Social studies integration of social science and humanities for the purpose of instruction in citizenship education.*

Berdasarkan definisi di atas tersirat dan tersurat beberapa hal bahwa studi sosial merupakan suatu sistem pengetahuan terpadu, misi utama studi sosial adalah Pendidikan Kewarganegaraan dalam suatu masyarakat yang demokratis, sumber utama (*contents*) studi sosial adalah ilmu-ilmu sosial humaniora dalam upaya penyiapan warga negara yang demokratis.

Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendidikan IPS dapat dikaji melalui konsep *social studies* sebagai Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship transmission*). Konsep ini memiliki makna bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian (sub sistem) yang memfokuskan diri pada pembentukan warga negara yang memiliki semangat demokratis, khususnya dalam mengembangkan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang cukup agar dapat berperan dalam kehidupan yang demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan IPS, tidak dapat terlepas bahkan sangat membutuhkan ilmu-ilmu sosial yang terdapat dalam mata pelajaran IPS (*social studies*) dan humaniora yang diseleksi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Sejarah memfokuskan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini yang dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Segi ekonomi difokuskan pada pemberian pengetahuan konsep dan teori ekonomi yang sederhana untuk menjelaskan fakta, peristiwa, dan masalah ekonomi yang dihadapi dalam rangka mencapai kesejahteraan (cerdas dan rasa bangga). Segi geografi difokuskan untuk memberikan bekal kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta permasalahan yang

timbul akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya (cinta tanah air yang diwujudkan dengan lingkungannya). Segi sosiologi difokuskan memberikan kemampuan memahami secara kritis sebagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang timbul seiring terjadinya perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya peraturan masyarakat dan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial budaya kedudukan, peran, norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Segi tata negara difokuskan pada peningkatan kemampuan memahami penyelenggaraan negara sesuai tata negara, tata peradilan, sistem pemerintahan negara Indonesia. Segi hukum difokuskan pada fungsinya sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan damai.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta, partisipasi yang efektif dan tanggung jawab itupun diingatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik (Winaputra 2009: 22).

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang sangat beragam dari segi agama, sosio

cultural, bahasa, usia dan suku bangsa agar menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Landasan konsep yang menjadi landasan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial politik yang terorganisir dengan tujuan agar manusia Indonesia memiliki kemauan dan kemampuan untuk.

1. Sadar dan patuh terhadap hokum (melek hukum).
2. Sadar dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (melek politik).
3. Memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional (insane pembangunan).
4. Cinta bangsa dan tanah air (memiliki sikap heroisme dan patriotisme).

Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru menurut Winaputra (2009: 131) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan merupakan program pendidikan di sekolah sebagai wahana yang utama serta sangat esensial dalam pendidikan demokrasi yang dilaksanakan melalui.

1. *Civic intelegence* (kecerdasan kewarganegaraan), yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial.
2. *Civic responsibility* (tanggung jawab warga negara), yaitu kemauan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawab, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin masa depan.

3. *Civic participation* (partisipasi warga negara), yaitu kemauan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawab, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin masa depan.

Berdasarkan landasan konsep utama Pendidikan Kewarganegaraan, maka dimensi Pendidikan Kewarganegaraan secara umum adalah sebagai berikut.

1. Sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan nilai dan moral karena yang disampaikan sebagai substansi isi Pendidikan Kewarganegaraan adalah nilai-nilai moral yang diperlukan oleh seorang warga negara dalam kehidupan sebagai warga negara
2. Sebagai pendidikan politik. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang memungkinkan peserta didik mengetahui yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Sebagai Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang diharapkan dapat menumbuhkan pengertian dan pemahaman peserta didik terhadap fungsi dan peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Sebagai pendidikan hukum dan kemasyarakatan. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang bukan hanya mendidik peserta didik memiliki pengetahuan yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, tetapi juga dapat menggunakannya atau menerapkannya dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Wahab A. Azis 2010:3.5-3.14).

Pendapat Wahab A.Azis tersebut menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya berupa pembelajaran konsep tetapi lebih kepada Pendidikan Praktik Kewarganegaraan. Peserta didik diharapkan tumbuh menjadi warga negara yang memiliki nilai dan moral, mengerti politik, memahami peranannya sebagai warga negara dan mengerti hukum dan kemasyarakatan dan memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajibannya serta menerapkannya dalam hidup bermasyarakat.

2.1.3 Pengertian Pembinaan

Kegiatan pembinaan kesiswaan merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam dan atau di luar lingkungan sekolah dalam rangka memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan agama serta norma-norma sosial baik lokal, nasional, maupun global untuk membentuk insan yang seutuhnya. Dengan kata lain, kegiatan pembinaan kesiswaan merupakan kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran yang ditujukan untuk membantu perkembangan peserta didik, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah.

Adapun tujuan kegiatan pembinaan kesiswaan adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2008, yaitu.

- a. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat dan kreativitas.
- b. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan.
- c. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat.
- d. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

2.1.4 Nasionalisme

2.1.4.1 Tinjauan tentang nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata *nation* (bangsa). Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nasionalisme juga adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negeri dan bangsanya, dengan maksud bahwa individu sebagai warga negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Nasionalisme merupakan gejala psikologis yang berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki rasa persatuan yang timbul karena kesamaan pengalaman sejarah, serta memiliki cita-cita bersama yang ingin dilaksanakan di dalam negara yang berbentuk negara nasional.

Nasionalisme menurut Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno dalam Suriyanto (2006:12) dipaparkan sebagai berikut.

Nasionalisme pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi dunia dari riwayat dan bukan semata-mata bukan timbul dari kesombongan bangsa belaka. Nasionalisme yang bukan *chauvinis*, tidak boleh tidak, haruslah menolak segala paham pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu copi atau tiruan dari nasionalisme barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dalam kemanusiaan. Nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya

itu sebagai wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti, adalah terhindar dari segala paham kekecilan dan kesempitan.

Menurut Azyumardi Azra (2011:24) “Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabaikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa”.

Menurut Hertz dalam Listiyanti (2007:32) dalam bukunya yang berjudul *Nationality in History and Politics* mengemukakan empat unsur nasionalisme, yaitu.

- 1) Hasrat untuk mencapai kesatuan
- 2) Hasrat untuk mencapai kemerdekaan
- 3) Hasrat untuk mencapai keaslian
- 4) Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran dari diri masing-masing yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya, dengan tetap menghormati bangsa lain karena merasa bagian dari bangsa lain di dunia. Sikap nasionalisme adalah suatu perbuatan atau tindakan cinta tanah air, dengan cara menghormati dan mempertahankan kedaulatan negaranya serta menghormati negara lain

2.1.4.2 Faktor Pendorong Munculnya Nasionalisme di Indonesia

Munculnya nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Timbulnya kembali golongan pertengahan, kaum terpelajar.
- 2) Adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagi bidang kehidupan.
- 3) Pengaruh golongan peranakan.
- 4) Adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme

Faktor dari luar yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah.

- 1) Fahaman-fahaman modern dari Eropa (liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme)
- 2) Gerakan pan-Islamisme
- 3) Pergerakan bangsa terjajah di Asia
- 4) Kemengan Rusia atas Jepang.

2.1.4.3 Tujuan Nasionalisme

Pada dasarnya nasionalisme yang muncul di banyak negara memiliki tujuan sebagai berikut.

- 1) Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
- 2) Menghilangkan ekstremisme (tuntutan yang berlebihan) dari warga negara (individu dan kelompok).

2.1.4.4 Makna Nasionalisme

Secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (*chauvinisme*) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

2.1.4.5 Akibat Nasionalisme

Nasionalisme yang muncul di beberapa negara membawa akibat yang beraneka ragam. Akibat munculnya nasionalisme di beberapa negara adalah sebagai berikut.

- 1) Timbulnya negara nasional
- 2) Perperangan
- 3) *Imperialisme*
- 4) *Proteksionisme*
- 5) Akibat sosial

2.1.4.6 Prinsip-Prinsip Yang Terkandung Dalam Nasionalisme

Pada saat melakukan kerja sama kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan dan keselamatan bangsanya. Oleh sebab itu, menurut

Ghani (1995:156) nasionalisme dalam arti luas mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.

1) Prinsip Kebersamaan

Nilai kebersamaan sikap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2) Prinsip Kersatuan dan kesatuan

Setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkhis (merusak). Untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan setia warga negara harus mampu mengedepankan sikap : kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial.

3) Prinsip Demokrasi/demokratis

Prinsip Demokrasi /demokratis memandang bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan , hak dan kewajiban yang sama, karena hakekat kebangsaan adalah adanya tekad untuk hidup bersama yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berkedaulatan, adil dan makmur.

2.1.4.7 Nilai Dasar Nasionalisme

Nilai dasar nasionalisme yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu :

- 1) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

- 2) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu.
- 3) Cinta akan tanah air dan bangsa.
- 4) Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat.
- 5) Kesetiakawanan sosial.
- 6) Masyarakat adil dan makmur.

2.1.4.8 Bentuk-Bentuk Nasionalisme

Beberapa bentuk nasionalisme antara lain :

1) Nasionalisme Kewarganegaraan

Disebut juga nasionalisme sipil adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran dari penertiban aktif rakyatnya, “kehendak rakyatnya”, “perwakilan politik”. Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean Jacques Reousseau.

2. Nasionalisme Etnis

Sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johan Gottfried Von Herder yang memperkenalkan konsep *Volk* (bahasa Jerman untuk “rakyat”).

3) Nasionalisme Romantik

nasionalisme organik atau disebut juga nasionalisme identitas. Merupakan lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi (*organic*) hasil dari bangsa atau ras, menurut semangat nasionalisme. Nasionalisme romantik bergantung pada perwujudan budaya etnis yang menempati idenalisme romantik, kisah tradisi yang telah direka untuk

konsep nasionalisme romantik. Misalnya Brothers Grimm yang dinukilkan oleh Herder yang merupakan kisah – kisah yang berkaitan dengan etnik Jerman.

4) Nasionalisme Budaya

Sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya “ sifat keturunan” seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contohnya adalah rakyat Tiong Hoa yang menganggap negara berdasarkan budaya. Unsur ras telah dibelakangkan dimana golongan Machu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat Tiong Koq. Kesediaan dinati Qing untuk menggunakan adat istiadat cina membuktikan keutuhan budaya Cina. Bahkan banyak rakyat Taiwan yang menganggap diri mereka nasionalis Cina karena persamaan budaya mereka, tetapi menolak RRT karena banyak pemerintahannya berpaham komunis.

5. Nasionalisme Kenegaraan

Merupakan variasi nasionalisme kenegaraan yang selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistiknya kuat sehingga diberi keutamaan lebih mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri dianggap selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip demokrasi. Penyelenggaraan sebuah *national state* adalah suatu argument yang unggul, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contohnya adalah nazisme di Jerman dan nasionalisme Turki Kontenporer.

6. Nasionalisme Keagamaan

Suatu bentuk nasionalisme dimana negara memperoleh *political legitimacy* dari persamaan agama. Dalam praktiknya bentuk nasionalime ini sering dicampur

adukkan dengan nasionalisme etnis. Contoh dari bentuk nasionalisme ini adalah *zionisme* di Israel, semangat nasionalisme di Irlandia yang didasari agama Katholik, atau nasionalisme di India yang dilandasi agama Hindu terutama yang diamalkan di partai BJP.

2.1.4.9 Peran sosial budaya dalam pembinaan rasa nasionalisme

Kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah kehidupan yang menyangkut aspek kemasyarakatan dan kebudayaan yang dijiwai oleh falsafah dasar Pancasila. Dengan demikian esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah pengembangan kondisi sosial budaya, sehingga setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila.

Kehidupan sosial budaya bangsa yang dilandasi oleh ideologi dan falsafah hidupnya dipengaruhi oleh kehidupan politik, ekonomi, dan ditunjang oleh situasi keamanan. Keadaan sosial yang serasi, stabil, dinamis, berbudaya dan berkepribadian hanya dapat berkembang didalam suasana aman dan damai. Kemegahan sosial budaya suatu bangsa mencerminkan tingkat kesejahteraan nasional baik fisik, materil maupun mental kejiwaan. Keadaan sosial yang ditimpang kontradiksi diberbagai bidang kehidupan tanpa budaya dan kepribadian, memungkinkan timbulnya ketegangan sosial yang membahayakan ketahanan nasional (Mohtar Mas' oed,1997).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan diwujudkan sebagai ukuran tuntutan sikap dan tingkah laku bagi bangsa dan negara Indonesia, akan memberikan landasan, semangat dan jiwa secara khas merupakan ciri pada

elemen–elemen sosial budaya bangsa dan negara Indonesia dan sekaligus menumbuhkan integrasi nasional dan identitas diri.

2.1.4.10 Pengertian belajar

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku atau prilaku sebagai akibat pengalaman (Sardiman A.M,(1978: 22). Prilaku atau tingkah laku mengandung pengertian yang luas mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap. Belajar merupakan salah satu bentuk prilaku yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Belajar senantiasa merupakan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan.

Keseluruhan proses pendidikan di sekolah kegiatan belajar merupakan kegiatan paling penting, karena berhasil tidaknya tujuan pendidikan banyak tergantung pada proses belajar.

2.1.5 Pengertian Pemahaman Moral

Secara esensial tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang didukung oleh kelompok model pembelajaran (VCT) berorientasi pada pemahaman moral (*moral cognitive*), sehingga pemahaman moral dalam kaitan ini diterjemahkan sebagai “pemahaman dan penghayatan nilai-nilai (Saripudin Udin, 1989: 132). Dimensi pemahaman yang merupakan bagian integral dari proses penalaran atau proses kognitif merupakan salah satu prasyarat bagi tumbuhnya proses penghayatan nilai/moral. Tentu saja pada gilirannya pemahaman dan penghayatan ini akan diharapkan melandasi prilaku moral. Dengan kata lain siswa yang memiliki tingkat pemahaman moral yang tinggi (*pasca konvensional*), ketika ia mengatakan

sesuatu itu baik/buruk, maka ia akan memiliki alasan/argumentasi yang rasional. Rasionalitas inilah yang menjadi landasan menetapkan sikap menerima atau menolak.

Dikaitkan dengan hakikat tujuan umum pendidikan moral, model-model orientasi penalaran moral ini relevan dengan hakikat tujuan “meningkatkan taraf moralitas, dan kemampuan penalaran tingkat tinggi “(Arbuthnot & Fausat,1981: 187). Hal ini pun tentu pada gilirannya diharapkan.

Secara singkat model-model yang termasuk kategori diatas antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Model pencapaian konsep nilai/moral.

Model ini sengaja dirancang untuk membantu para siswa mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk mengorganisasikan informasi sehingga dapat memberi kemudahan bagi siswa untuk mempelajari konsep itu dengan cara yang lebih efektif.

b. Model berfikir induktif.

Model berfikir induktif dirancang dan dikembangkan dengan tujuan untuk mendorong para pelajar menemukan dan mengorganisasikan informasi, menciptakan nama suatu konsep moral dan menjajaki berbagai cara yang dapat menjadikan para pelajar lebih terampil dalam mengorganisasikan informasi.

c. Model latihan penelitian masalah nilai moral.

Model ini dirancang untuk melibatkan para pelajar dalam proses penalaran mengenai hubungan sebab akibat dan menjadikan siswa lebih fasih dan cermat

dalam mengajukan pertanyaan, membangun konsep dan merumuskan dan mengetes hipotesis.

d. Model pemandu awal.

Kekuatan model ini adalah dalam memberi pengalaman belajar dengan struktur kognitif yang digunakan untuk memahami materi yang disajikan dalam belajar, membaca dan dengan menggunakan media belajar lainnya.

e. Model pengembangan intelek.

Model ini didasarkan pada studi tentang perkembangan kognitif yang bertujuan untuk membantu para guru menyelesaikan proses belajar mengajar terhadap taraf kematangan para siswa dan untuk merancang cara-cara meningkatkan kecepatan perkembangan kognitif para siswa.

2.1.6 Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Model VCT

Metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik agar proses VCT dapat berlangsung secara efektif dalam proses pembelajaran di kelas adalah (Cheppy, 1988: 127) sebagai berikut.

1. Metode dialog. Pendidik menawarkan nilai tertentu untuk dibicarakan, dibahas secara logis di antara peserta didik. Dalam dialog ini garis besarnya sebagai berikut.
 - a) Pendidik menawarkan nilai tertentu dalam suatu dilema moral, peserta didik mendalami dengan metode inkuiri analisis dilema moral.
 - b) Peserta didik diberi kebebasan untuk menanggapi, bertanya, menjelaskan satu sama lain yang berlangsung dalam diskusi kelompok.
 - c) Peserta bebas mengambil pilihan, keputusan dan kesimpulan terkait dengan nilai yang jadi bahan dialog.
 - d) Pilihan nilai diberi alasan dan dikemukakan pada teman yang lain lewat presentasi.
 - e) Pendidik atau teman sejawat memberikan pertanyaan kritis terhadap nilai pilihan peserta didik.
 - f) Peserta didik menyampaikan niat untuk melaksanakan pilihan nilainya.

2. Diskusi kelompok (*cooperative learning*). Pendidik membentuk kelompok-kelompok dalam kelas, dan kepada tiap kelompok pendidik menyampaikan sejumlah daftar nilai beserta pertanyaan kritis terkait dengan nilai-nilai tersebut secara berbeda. Masing-masing peserta didik secara bebas, dalam kelompok berdiskusi, menanggapi pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap nilai yang ditawarkan, memberi argumentasi atas pilihannya. Kemudian setiap kelompok mencoba merangkum pendapat bersama dan dalam pleno peserta didik atau kelompok diberi kebebasan mengutarakan pilihan nilai beserta alasannya, termasuk niat untuk melaksanakan nilai yang telah dipilih. Peran pendidik sebagai pendamping dan fasilitator dalam proses diskusi kelompok agar diskusi dapat lancar.
3. Studi kasus dengan *problem solving* moral, studi kasus moral yang berdilema (Hall, 1982). Pendidik membuat cerita berkasus yang mengandung unsur *problem solving* moral atau pemecahan kasus yang mengandung dilema moral atau nilai tertentu, disertai sejumlah pertanyaan untuk ditanggapi peserta didik baik secara individual maupun secara kolektif dalam diskusi kelompok dan dipresentasikan dalam pleno. *Problem solving* moral sebaiknya mengandung dilema nilai atau moral yang jelas dan tajam sehingga peserta didik ditantang untuk mencari penyelesaian. Dalam diskusi kelompok peserta didik bebas memilih jalan keluar dari dilema yang ada, dengan disertai alasannya. Peran pendidik sebagai fasilitator dalam diskusi, hanya memberi pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap argumentasi peserta didik, tanpa memaksakan pendapatnya.

2.1.6.1 Tujuan menggunakan VCT dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Taniredja, Tukiran. (2012: 88) tujuan menggunakan pendekatan VCT dalam proses pembelajaran, sebagai berikut.

1. Mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijak menentukan target nilai yang akan dicapai.
2. Menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki baik tingkat maupun sifat yang positif maupun negatif untuk selanjutnya ditanamkan kearah peningkatan dan pencapaian target nilai.
3. Menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional (logis) dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa sebagai proses kesadaran moral bukan kewajiban moral.

4. Melatih siswa dalam menerima menilai nilai dirinya dan posisi nilai orang lain, menerima serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan yang berhubungan dengan pergaulannya dan kehidupan sehari-hari.

2.1.6.2 Bentuk-bentuk VCT

Menurut Djahiri (1985: 90-91) ada beberapa bentuk pendekatan VCT, sebagai berikut.

1. VCT dengan menganalisa suatu kasus yang kontroversional, suatu cerita yang dilematis, mengomentari kliping, membuat laporan dan kemudian dianalisa bersama.
2. VCT dengan menggunakan matrik. Jenis VCT ini meliputi Daftar Baik-Buruk, Daftar Tingkat Urutan, Daftar Skala Prioritas, Daftar Gejala Kontinum, Daftar Penilaian Diri Sendiri, Daftar Membaca Pikiran Orang Lain tentang Diri Kita, dan Perisai.
3. VCT menggunakan Kartu Keyakinan, kartu sederhana ini berisikan; pokok masalah, dasar pemikiran positif dan pemecahan pendapat siswa yang kemudian diolah dengan analisa yang melibatkan sikap siswa terhadap masalah tersebut.
4. VCT dengan Teknik Inkuiri Nilai dengan pertanyaan yang acak random, dengan cara ini siswa berlatih berpikir kritis, analitis, rasa ingin tahu dan sekaligus mampu merumuskan berbagai hipotesa/asumsi, yang berusaha mengungkap suatu nilai atau sistem nilai yang ada atau dianut, atau yang menyimpang.

2.1.6.3 Prinsip – prinsip VCT

1. Penanaman nilai dan perubahan sikap dipengaruhi banyak faktor antara lain faktor potensi diri. Kepekaan emosi, intelektual dan faktor lingkungan. Norma nilai dan masyarakat, sistem pendidikan dan lingkungan keluarga dan lingkungan bermain.
2. Sikap dan perubahan sikap di pengaruhi oleh stimulus yang diterima siswa dan kekuatan nilai yang telah tertanam atau dimiliki pada diri siswa.

3. Nilai, moral dan norma dipengaruhi oleh faktor perkembangan, sehingga guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan moral (*moral development*) dari setiap siswa. tingkat perkembangan moral untuk siswa dipengaruhi oleh usia dan pengaruh lingkungan terutama lingkungan sosial.
4. Pengubahan sikap dan nilai secara rasional, sehingga dalam diri siswa muncul kesadaran diri bukan karena rasa kewajiban bersikap tertentu atau berbuat tertentu.
5. Pengubahan nilai memerlukan keterbukaan, karena itu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui VCT menuntut keterbukaan antara guru dan siswa.

2.1.6.4 Proses pelaksanaan VCT

Menurut Hall dan Simon dalam Sutarjo Adisusilo (2012: 147), proses penentuan nilai dan sikap mencakup tujuh subproses atau aspek yang biasanya digolongkan menjadi tiga kategori, sebagai berikut.

1. Memilih.
 - a. Memilih dengan bebas.
 - b. Memilih dari berbagai alternatif.
 - c. Memilih dari berbagai alternatif setelah mengadakan pertimbangan tentang berbagai akibatnya.
2. Menghargai/menjunjung tinggi.
 - a. Menghargai dan merasa bahagia dengan pilihannya.
 - b. Bersedia mengakui/menegaskan pilihannya itu di depan umum.
 - c. Berbuat/berperilaku sesuatu sesuai dengan pilihannya.

3. Bertindak.
 - a. Berulang-ulang bertindak sesuai dengan pilihannya itu hingga akhirnya merupakan pola hidupnya.

Berikut ini masing-masing subproses diperjelas secara singkat Hall, Raths, et al., dalam Sutarjo Adisusilo (2012: 147-150).

1. Memilih dengan bebas. Memilih nilai secara bebas berarti bebas diri segala bentuk tekanan. Lingkungan dapat memaksakan sesuatu nilai pada seseorang yang sebenarnya tidak disukainya. Adakalanya lingkungan menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan keyakinan kita. Hal yang demikian belum merupakan nilai yang sesungguhnya. Nilai yang sesungguhnya adalah nilai-nilai yang kita pilih secara bebas. Karena itu nilai-nilai yang ditanamkan pada masa kanak-kanak belum merupakan nilai yang sesungguhnya bagi anak yang bersangkutan, itu baru indikator nilai atau benih yang dapat berkembang menjadi nilai yang sesungguhnya.
2. Memilih dari berbagai alternatif. Memilih secara bebas mengandaikan ada berbagai alternatif. Kalau tidak ada alternatif pilihan, maka tidak ada kebiasaan memilih.
3. Memilih sesudah mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing alternatif. Memilih nilai berarti menentukan suatu nilai sesudah mempertimbangkan konsekuensinya dari semua alternatif yang ada. Tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan apa akibatnya, jika demikian seseorang tidak bebas memilih. Sebaliknya jika seseorang mengetahui akibat-akibat dari alternatif yang ada, maka dia dapat memilih dengan lebih tepat. Dapat terjadi bahwa akibat pilihan tidak diketahui sebelumnya. Ini tidak berarti bahwa tidak

ada pilihan bebas, tetapi apabila orang sudah menyadari akibat-akibat pilihannya, maka dia harus mempertimbangkan pilihannya kembali.

4. Menghargai dan senang dengan pilihan yang dibuat. Nilai adalah sesuatu yang dianggap positif: dihargai, dihormati, dijunjung tinggi, diagungkan, dipelihara. Nilai membuat orang senang, gembira, bersyukur. Kalau menentukan pilihannya dan ternyata sesudah melakukan atau mengalami pilihannya itu dia menjadi gembira atau senang maka dia menemukan nilai bagi dirinya. Tetapi kalau orang menjadi murung, sedih karena pilihannya, maka kiranya dia telah keliru dalam menentukan pilihannya. Jadi, kalau seseorang memilih sesuatu nilai, seharusnya dia merasa bahagia, senang atas pilihannya, dan memelihara sebagai sesuatu yang berharga baginya.
5. Bersedia mengakui pilihan di muka umum. Kalau nilai dijunjung tinggi, dihargai dan membuat orang bahagia atau senang maka orang tentu bersedia mengakui, menyatakannya kepada orang lain. Kalau orang menjunjung tinggi suatu nilai, maka orang yang bersangkutan bisa diharapkan akan mengkomunikasikan kepada orang lain.
6. Berperilaku sesuai dengan pilihan. Agar sesuatu benar-benar merupakan nilai bagi seseorang, maka sikap hidup, tindakan yang bersangkutan harus berdasarkan nilai itu, nilai itu harus diwujudkan atau tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya. Salah satu pernyataan yang perlu diajukan untuk melihat apakah sesuatu sudah merupakan nilai yang sesungguhnya ialah pertanyaan ini: "Apakah saya sudah bertindak berdasarkan nilai yang saya pilih, atau apakah pilihan masih merupakan sesuatu yang sedang saya pertimbangkan?" kalau orang belum mewujudkannya dalam sikap atau tingkah lakunya, belum

bertindak sesuai pilihannya itu, maka nilai tersebut belum merupakan nilai yang sesungguhnya, hal yang dikatakan sebagai nilai itu hanyalah sesuatu keinginan, gagasan, impian saja. Dengan klarifikasi nilai, orang dibantu untuk dapat membedakan apa yang dilakukannya dan apa yang diinginkannya, dirasakannya atau dipikirkannya. Tindakan seseorang mencerminkan nilai yang dianut, yang diyakininya, dia bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan nilainya. Dengan demikian, nilai itu memburukan arah pada hidupnya. Bobot suatu nilai dapat juga diukur dengan melihat berapa banyak waktu yang digunakan untuk memperhatikan nilai tertentu, berapa banyak tenaga yang dicurahkan demi nilai yang dianutnya, dan seberapa banyak hartanya yang dikorbankan demi nilai yang diyakininya.

7. Berulang-ulang berperilaku sesuai dengan pilihan sehingga terbentuk suatu pola hidup. Agar sesuatu sungguh-sungguh merupakan nilai bagi seseorang, maka tindakannya dalam berbagai situasi harus sesuai dengan nilai itu. Dia bertindak berdasarkan nilai yang diyakininya, dan ini berulang-ulang sehingga merupakan pola hidupnya. Alam tahap ini nilai bukan saja dipahami, dimengerti (kognitif), diyakini kebenarannya (efektif), tetapi diwujudkan (psikomotor) dalam perbuatan atau tindakan hidup.

2.1.6.5 Kelebihan dan kekurangan VCT

Menurut Casteel dalam Adisusilo (2012: 151) ada enam alasan pendidik sebaiknya menggunakan VCT dalam pembelajaran nilai di kelas, sebagai berikut.

1. *Value clarification enhances the ability of students to communicate their ideas, beliefs, values, and feelings.*

2. *Value clarification enhances the ability of students to empathize with other person, especially those circumstances may differ significantly from their own.*
3. *Value clarification enhances the ability of students to resolve problems as they arise.*
4. *value clarification enhances the ability of students to assent and dissent as a member of a sosial group.*
5. *Value clarification enhances the ability of students to engage in decision making.*
6. *Value clarification enhances the ability of students to hold and use consistent beliefs and disbeliefs.*

Berdasarkan kutipan tersebut, pendekatan VCT amat berguna bagi peserta didik untuk berlatih mengkomunikasikan keyakinan, nilai hidup, cita-cita pribadi pada teman sejawat; berlatih berempati pada teman lain bahkan yang mungkin berbeda keyakinannya; berlatih memecahkan persoalan dilema moral; berlatih untuk setuju atau menolak keputusan kelompok; berlatih terlibat dalam membuat keputusan ataupun mempertahankan atau melepaskan keyakinannya.

Menurut Djahiri (1985: 91) VCT memiliki keunggulan untuk pembelajaran afektif karena.

- 1) Mampu membina dan menanamkan nilai dan moral pada ranah *internal side*.
- 2) Mampu mengklarifikasi/menggali dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan selanjutnya akan memudahkan bagi guru untuk menyampaikan makna/pesan nilai/moral.
- 3) Mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri siswa, melihat nilai yang ada pada orang lain dan memahami nilai moral yang ada dalam kehidupan nyata.
- 4) Mampu mengundang, melibatkan, membina, dan mengembangkan potensi diri siswa terutama mengembangkan potensi sikap.
- 5) Mampu memberikan sejumlah pengalaman belajar dari berbagai kehidupan.
- 6) Mampu menangkal, meniadakan mengintervensi dan memadukan berbagai nilai moral dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang dan
- 7) Memberi gambaran nilai moral yang patut diterima dan menuntun serta memotivasi untuk hidup layak dan bermoral tinggi.

Pendekatan ini memberi penekanan pada pemilihan dan penentuan nilai secara bebas serta sikap terhadapnya. Bagi penganut pendekatan ini, nilai bersifat subjektif, dipilih oleh seseorang berdasarkan pada berbagai latar belakang

pengalaman dan pertimbangan nalarnya sendiri, tidak ditentukan secara sepihak oleh faktor luar, seperti agama, masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi penganut pendekatan ini, isi nilai tidak terlalu penting. Hal yang sangat dipentingkan dalam program pendidikan nilai adalah mengembangkan keterampilan peserta didik dalam melakukan proses menilai dan mengambil keputusan, sejalan dengan pandangan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Hall dan Cheppy dalam Adisusilo (2012: 153) bahwa bagi penganut pendekatan ini, pendidik bukan sebagai pengajar nilai, melainkan sebagai motivator dan fasilitator. Peranan pendidik adalah mendorong peserta didik untuk memikirkan, mendiskusikan, memilih dan menimbang-nimbang nilai yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan nilai-nilai tertentu untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dalam melakukan proses menilai.

2.1.6.6 Kelemahan-kelemahan VCT

1. Apabila guru/dosen tidak memiliki kemampuan melibatkan peserta didik dengan keterbukaan, saling pengertian dan penuh kehangatan maka siswa akan memunculkan sikap semu atau imitasi/palsu. Siswa akan bersikap menjadi siswa yang sangat baik ideal patuh dan penurut namun hanya bertujuan untuk menyenangkan guru atau memperoleh nilai yang baik.
2. Sistem nilai yang dimiliki dan tertanam guru/dosen dalam mengajar terutama memerlukan kemampuan/keterampilan bertanya tingkat tinggi yang mampu mengungkap dan menggali nilai yang ada dalam diri peserta didik.

3. Sangat di pengaruhi oleh kemampuan guru/dosen dalam mengajar terutama memerlukan kemampuan/keterampilan bertanya tingkat tinggi yang mampu mengungkap dan menggali nilai yang ada dalam diri peserta didik.
4. Memerlukan kreativitas guru/dosen dalam menggunakan media yang tersedia dilingkungan terutama yang aktual dan faktual sehingga dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.

Mengacu pada kelemahan-kelemahan tersebut, maka untuk mengatasinya, seorang guru harus berlatih memiliki keterampilan mengajar yang sesuai dengan kompetensinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan variasi mengajar sesuai dengan kreativitas yang dimiliki guru dengan memodifikasi pendekatan VCT dengan model pembelajaran yang menyenangkan.

2.1.6.7 Cara mengatasi kelemahan VCT

1. Guru/dosen berlatih dan memiliki keterampilan mengajar sesuai standar kompetensi guru/dosen. Pengalaman guru/dosen yang berulang kali menggunakan VCT akan memberikan pengalaman yang sangat berharga karena memunculkan model-model VCT yang merupakan modifikasi sesuai kemampuan dan kreativitas guru/dosen.
2. Dalam setiap pembelajaran menggunakan tematik atau pendekatan kontekstual, antara lain dengan mengambil topik yang sedang terjadi dan ada disekitar peserta didik, menyesuaikan dengan hari besar nasional, atau mengaitkan dengan program yang sedang dilaksanakan pemerintah.

2.1.6.8 Manfaat VCT

Ada berbagai manfaat yang dapat dipetik bila pendekatan VCT diterapkan. Manfaat menurut Simon, et al. dalam Sutarjo Adisusilo (2012: 155), sebagai berikut.

1. Memilih, memutuskan, mengkomunikasikan, mengungkapkan gagasan, keyakinan, nilai-nilai dan perasaannya.
2. Berempati (memahami perasaan orang lain, melihat dari sudut pandang orang lain).
3. Memecahkan masalah.
4. Menyatakan sikap: setuju, tidak setuju, menolak atau menerima pendapat orang lain.
5. Mengambil keputusan.
6. Mempunyai pendirian tertentu, menginternalisasikan dan bertingkah laku sesuai dengan nilai yang telah dipilih dan diyakini.

Jadi, inti dari VCT adalah melatih peserta didik untuk berproses untuk melakukan penilaian terhadap nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam masyarakat, dan akhirnya menetapkan nilai yang menjadi acuan hidupnya. Menurut Harmin dalam Sutarjo Adisusilo (2012: 156) penerapan klarifikasi nilai akan efektif bila fasilitator atau pendidik. (1) Bersikap menerima dan tidak mengadili (*nonjudgmental*) pilihan nilai peserta didik, menghindari kesan memberi nasihat, menggurui seakan pendidik lebih tahu dan lebih baik (2) Membiarkan adanya kebhinekaan pandangan, dialog dilakukan secara terbuka, bebas dan individual (3) Menghargai kesediann peserta didik untuk ikut berpartisipasi (*sharing*) atau tidak, hindari unsur pemaksaan untuk berpendapat atau bersikap (4) Menghargai

jawaban/respons peserta didik, tidak memaksa peserta didik untuk member respons tertentu apabila memang peserta didik tidak menghendaknya (5) Mendorong peserta didik untuk menjawab, mengutarakan pilihan dan mengambil sikap secara jujur (6) Mahir mendengar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengklarifikasi nilai hidup dan (7) Mahir mengajukan/membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kehidupan pribadi dan sosial.

2.1.6.9 Langkah-langkah pembelajaran dengan VCT

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan VCT menurut Djahiri (1985: 61).

1. Membuat/mencari stimulus. Berupa contoh keadaan/perbuatan yang memuat nilai-nilai kontras yang disesuaikan dengan topik atau tema target pembelajaran. Dengan persyaratan hendaknya mampu merangsang, melibatkan dan mengembangkan potensi afektual siswa, terjangkau dengan tingkat berpikir siswa.
2. Kegiatan pembelajaran.
 - a. Guru melontarkan stimulus dengan cara membaca/menampilkan cerita atau menampilkan gambar, kegiatan ini dapat dilakukan oleh guru sendiri atau meminta bantuan kepada siswa lain.
 - b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdialog sendiri atau sesama teman sehubungan dengan stimulus tadi.
 - c. Melaksanakan dialog terpimpin melalui pertanyaan yang telah disusun oleh guru yang berhubungan dengan stimulus tadi, baik secara individual maupun berkelompok.
 - d. Menentukan argumen atau pendirian melalui pertanyaan guru baik secara individual maupun berkelompok.
 - e. Pembahasan atau pembuktian argumen.
 - f. Penyimpulan.

2.1.7 Penelitian Relevan

Penelitian relevan yaitu penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan

No	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Fita Kumasari (2013)	Implementasi Pendekatan VCT (<i>Value Clarification Technique</i>) dalam Pembelajaran P.Kn di kelas 2 SD Negeri 1 Kaligadung Kabupaten Kendal.	Upaya memperbaiki sikap siswa dikelas 2 SD Negeri 1 Kaligadung, Kendal melalui pendekatan klarifikasi nilai atau VCT (<i>Value Clarification Technique</i>)	Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	Penggunaan Pendekatan VCT (<i>Value Clarification Technique</i>) dapat memperbaiki sikap siswa dikelas 2 SD Negeri Kaligadung, Kendal.
2.	Sudrajat (2012)	Mewujudkan Insan Cendikia, Mandiri dan Bernurani Melalui Pendekatan <i>Value Clarification Technique</i> dalam Mata Kuliah Sejarah Lokal pada Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta	Untuk mengetahui peningkatan pemahaman moral, sikap dan kemandirian mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan VCT (<i>Value Clarification Technique</i>)	Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman moral, sikap dan kemandirian mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

No	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
3.	Fitra Wisnu Ilhami (2011)	Impelementasi Model Pembelajaran VCT (<i>Value Clarification Technique</i>) untuk Mengembangkan Potensi Afektual pada Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional kelas X Semester Ganjil SMAN 1 Semarang,	Untuk mengetahui potensi afektual siswa melalui penerapan VCT (<i>Value Clarification Technique</i>)	Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan VCT (<i>Value Clarification Technique</i>) dapat meningkatkan sikap, nilai dan moral siswa di SMAN 1 Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti pendekatan VCT. Namun, peneliti ingin melihat dari sisi yang berbeda yaitu pendekatan VCT sebagai pembinaan rasa nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan Harapannya dengan pendekatan VCT dapat tertanam dengan baik dalam diri peserta didik jiwa nasionalismenya.